

Pengaruh Media Terhadap Pemerintahan dan Politik Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi

Zainal Bakri

Act. Ngo Bencana Alam Jakarta-Lhokseumawe
zxbakri@gmail.com

Abstract: *Some theories describe how powerful and influential media in the life of society and the state. In developed countries whose governments to be democratic, the media and even positioned as the fourth pillar of democracy (the four estate). But it turns out in certain circumstances of a country, the media can also be fully controlled object and should follow the wishes of the ruler. The media in Indonesia is one of the bad experience in the history of his way when this country under the rule of the New Order regime. Controlling and controlled to be two things that run contradictory. On the one hand, the media should carry out social functions, including overseeing the policies taken by the government. But on the other hand, the media are also shackled by the government to harness the power of the instrument, to curb the grip even in the media so as not free expression and speech. Gait media against the government and politics in the new order after the reform and thus contrasts. At the new order shackled media, but later in the reform era, so free media and free from state intervention.*

Keyword: *Influence of media, Government and Politics*

A. Pendahuluan

Pengaruh media dalam sebuah negara adalah sebuah keniscayaan. Tak hanya di Indonesia, namun di hampir semua negara, baik itu di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, sosialis maupun monarki, memiliki catatan panjang terhadap pengaruh media massa bagi pemerintahan negara tersebut.

Di Indonesia, sejak zaman penjajahan, era kemerdekaan, dan hingga kini, peran media dalam pemerintahan masih terus dirasakan. Media di tanah air juga jatuh bangun dalam mengawal pemerintahan. Bahkan dalam kancah politik, media di Indonesia tampil begitu dominan. Begitu banyak peran yang dimainkan, sehingga tidak berlebihan bila penulis mengatakan, media telah ikut mewarnai atmosfer politik tanah air. Namun bila kita melongok ke belakang, peran dan fungsi media sungguh tak berkesan. Begitu kuat belenggu dan kungkungan yang diciptakan oleh rezim

pemerintahan orde baru. Posisi media kala itu mengalami kondisi paling buruk, akibat intervensi dari penguasa. Media dipaksa mengikuti keinginan pemegang kekuasaan, bukan keinginan masyarakat sebagai pembaca.

Media massa seperti yang dikemukakan oleh Althusser dan Gramsci¹ merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau negara. Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan dan sebagainya. Namun setelah terjadinya reformasi pada tahun 1997-1998, kemajuan media massa di tanah air tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem politik. Media massa diharapkan dan diandalkan berperan sebagai pengawas (*watch dog function*), untuk mengungkap kebenaran dan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan.

Banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh media massa pada suatu negara yang menjamin terhadap kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya. Akan tetapi kecenderungan beberapa media massa di suatu negara dalam perspektif komunikasi khususnya, belum demokratis dan masih bersifat linier dalam menyampaikan arus informasi dari atas ke bawah (*top down*). Agar media massa mampu menjalankan peranannya, maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara profesional.² Menurut Denis McQuail³, kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekadar untuk membebaskan media massa dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat. Sistem politik suatu negara sangat menentukan bagaimana sistem media massa tersebut berperan, yang pasti sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dalam arti luas sering disebut filsafat sosial.

¹Sobur. A, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h 30.

²Jamhur Poti, *Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, (Tanjungpinang: FISIP Umrah), h 18.

³Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1991), h 126.

Menurut Ati Rahmiati, dalam filsafat sosial hubungan manusia dengan negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Rasional: Hubungan manusia dan negara ligaliter atau setara, dalam hal ini “manusia mampu eksis secara individu, maka dari itu ia menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun demikian pada umumnya manusia selalu menempatkan dirinya secara proposional, tahu kapan saatnya untuk bebas dan tidak.
2. Absolutisme: Cara pandang manusia yang tidak akan eksis bila tidak ada kelompok. Adanya sistem otoritarian, manusia tidak ada apa-apanya tanpa kelompok. Contoh nyata sistem otoritarian di terapkan di negara Malaysia. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem media massa dipengaruhi oleh sistem sosial politik dan filsafat sosial (rasionalisme dan absolutisme).⁴

B. Kajian Teoretis

Media massa adalah wadah yang menampung kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pers sebagai bagian dari media massa berhak memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat.⁵ Ada dua arah bentuk kebebasan pers menurut Ashadi Siregar. Pertama, yaitu kebebasan warga negara untuk mendapatkan informasi publik serta kebebasan warga menyatakan pendapat tentang masalah publik, dan kedua, yaitu kebebasan media pers untuk mencari dan menyampaikan informasi publik.⁶

George Gerbner dalam Teori Kultivasi menyimpulkan pentingnya media massa sebagai kemampuan untuk menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan referensi umum, dan memindahkan perhatian dan kekuasaan. Komunikasi massa merupakan proses organisasi media menciptakan dan menyebarkan pesan-pesan pada masyarakat luas dan proses pesan tersebut dicari, digunakan, dipahami dan dipengaruhi oleh audiens. Menurut Denis McQuail⁷ ada 8 metafora yang mengartikan aspek aspek media:

⁴Ati Rahmiati, *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunitas*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h 11

⁵Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281

⁶ Rizal Mallarangeng, *Pers Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010)

⁷Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1999), h. 405

1. Media merupakan jendela (*windows*): yang memungkinkan kita untuk melihat lingkungan kita lebih jauh.
2. Penafsir (*interpreters*) yang membantu kita memahami pengalaman.
3. Landasan (*platform*) atau yang membawa atau menyampaikan informasi.
4. Komunikasi interaktif (*interaktif communication*) yang meliputi opini audiens.
5. Penanda (*signposts*) yang memberi kita instruksi dan petunjuk.
6. Penyaring (*filter*) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain.
7. Cermin (*mirrors*) yang merefleksikan diri kita.
8. Penghalang (*barriers*) yang menutupi kebenaran.

Joshua Meyrowitz⁸ menggambarkan 3 metafora yang mewakili sudut pandang mengenai media:

- a. Media sebagai vessel: gagasan bahwa media adalah pembawa pesan (konten yang netral).
- b. Media sebagai bahasa: masing-masing media memiliki unsur struktural atau tata kalimat, seperti sebuah bahasa.
- c. Media sebagai lingkungan: dilandasi oleh gagasan bahwa kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan berbagai informasi yang disebarkan oleh keberadaan media dengan beragam kecepatan, ketepatan, kemampuan melakukan interaksi, persyaratan fisik, dan kemudahan belajar.

Elizabeth Noelle-Neumann dalam teori spiral kebisuan (*spiral of silence*) berpendapat bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Menurut teori ini ada tiga karakteristik komunikasi massa yang dapat berpengaruh pada opini publik, yaitu:

- 1) Kumulasi (*cummulation*) atau penimbunan;
- 2) Ubiquitas (*ubiquity*) keberadaan media yang selalu ada dimana-mana; dan
- 3) Konsonansi (*consonance*) atau persesuaian antara apa yang disampaikan media massa dengan opini publik.

Media massa tentunya memiliki beberapa pengaruh terhadap publik. Sebagaimana teori pengaruh media massa yang dikemukakan oleh Kenneth Newton dan Jan W van Deth, media massa di Indonesia pada masa orde baru mempengaruhi publik dengan teori agenda setting. Dalam teori ini

⁸*Ibid*, h 407

media massa dianggap tidak dapat menentukan apa yang dipikirkan masyarakat. Dalam hal ini media dapat memiliki agenda sendiri dalam penyajian berita baik terhadap masyarakat ataupun pemerintah.⁹ Besar kecilnya pengaruh media massa terhadap politik berkaitan dengan corak politik pada negara itu. Sibert, Peterson, dan Schramm mengelompokkan pers dalam beberapa sistem. Sistem yang diterapkan pada masa orde baru adalah sistem pers otoriter. Teori ini hampir secara otomatis dipakai di semua negara. Teori ini membentuk dasar bagi sistem-sistem pers di berbagai kalangan masyarakat modern.¹⁰

Media dan sistem pers seperti ini berfungsi menunjang negara. Konsekuensinya, pemerintah menguasai secara langsung dan mengawasi kegiatan di media massa, sehingga media secara penuh bergantung pada penguasa (pemerintah).¹¹ Pada orde baru media massa justru berfungsi sebagai alat penyampaian pada masyarakat program-program pembangunan nasional.¹²

C. Pembahasan

Secara teoritis sistem pers yang dianut di Indonesia adalah sistem pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Pemikiran dasar teori ini seperti diutarakan Peterson¹³, bahwa kebebasan, mengandung di dalamnya suatu tanggungjawab yang sepadan; dan pers, yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tahu tanggung-jawabnya dan menjadikan itu landasan operasional mereka.

Di Indonesia, landasan konstitusi yang dipakai adalah pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

⁹Kacung Marijan, *Sistem Politik ...* h. 282

¹⁰Siebert, Peterson, dan Schramm. *Empat Teori Pers*, (Jakarta: Intermega, 1986), h. 81

¹¹Kacung Marijan, *Sistem Politik ...*h. 284

¹²Depari, Eduard dkk. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Suatu Kumpulan Karangan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978)

¹³Schram, Wilbur dan Peterson. *Empat Teori Pers*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), h. 83.

undang. Dengan mengacu pada pasal tersebut, secara nyata kebebasan pers mendapat jaminan yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya, yaitu:

- a. Melayani sistem politik dengan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk berdebat terutama dalam masalah kebijakan publik,
- b. Menjadi anjing penjaga dan hak-hak perorangan warga negara (kontrol sosial) dan
- c. Membiaya finansial secara mandiri.¹⁴

Sementara berita tentang suatu peristiwa pada dasarnya adalah suatu rekonstruksi tertulis. Wartawan melaporkan kembali apa yang dilihat, dirasakan, dan diamati kepada pembaca. Idealnya, seorang wartawan harus dapat menceritakan ulang sebuah peristiwa secermat mungkin, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung di tempat kejadian.¹⁵

1. Pengaruh Media Terhadap Masyarakat dan Pemerintah

Sejauh mana kekuatan media berpengaruh pada masyarakat? Pertanyaan ini kerap menjadi topik diskusi, baik itu di dalam ruang akademik maupun dalam beberapa diskusi politik dan praktisi media. Jawaban singkat yang bisa menjawab pertanyaan ini secara cepat adalah media bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Kekuatan media ini kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan dan kemudian mengubah mereka menjadi konsumen produk tersebut. Para politisi dan pengambil kebijakan juga memanfaatkan kekuatan dan pengaruh ini untuk merebut simpati masyarakat. Keikut-sertaan media dalam mengubah sistem politik dengan melalui pembentukan opini publik atau pendapat umum, yakni upaya pembangunan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau aktor politik.¹⁶

Dalam teori arus bertahap diasumsikan bahwa efek media terjadi secara tidak langsung dan termediasi melalui *opinion leaders*. *Opinion leaders* ini memiliki pengertian individu, yang gagasan dan perilakunya menjadi model bagi orang lain, yang kemudian mengkomunikasikan pesan

¹⁴Ibid, h 84.

¹⁵Moch. Syahri, *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, (Malang: Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2002)

¹⁶Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 9.

tersebut, sehingga mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku para pengikut mereka.

Demikian juga menurut teori agenda setting. Media tidak bisa menentukan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, namun media bisa mempengaruhi apa yang masyarakat pikirkan. Pers juga memiliki posisi yang sangat penting di dalam berjalan –tidaknya roda pemerintahan yang demokratis. Berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan-kebijakan yang akan atau telah dibuat, pers bisa melakukan kritik atau bahkan oposisi, atau sebaliknya memberikan dukungan.¹⁷

2. Intervensi Pemerintah Orde Baru

Masa pemerintahan orde baru merupakan masa pembungkaman media paling banyak sepanjang sejarah Indonesia. Namun awalnya, antara tahun 1966 sampai dengan awal tahun 1970-an hampir tidak ada masalah antara pers dengan pemerintah. Inilah, masa yang disebut masa bulan madunya Pers –Pemerintah Soeharto. Pers boleh meliput apapun sejauh pers tidak menentang kekuasaan yang anti komunis.¹⁸

Awal 1970-an masalah mulai muncul. Lambat laun kebebasan mulai dikekang, terutama menjelang dilaksanakannya pemilu 1971. Secara perlahan musuh politik Presiden Soeharto mulai muncul, orang-orang yang tidak puas terhadap pemerintahan baru berani berbicara lantang. Peristiwa-peristiwa semacam ini tidak luput dari liputan pers. Liputan yang dilakukan pers ikut menyulut komponen lain untuk menentang pemerintah. Puncaknya meletuslah peristiwa Malari 1974 yang menentang penggunaan produk buatan Jepang. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah mulai melakukan kontrol terhadap pers, karena dianggap membahayakan bagi kelangsungan stabilitas negara.

Memang pemerintah Orde Baru telah menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap pers. Kontrol itu bisa berupa slogan-slogan, seperti pers yang bebas dan bertanggung jawab atau interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.¹⁹

¹⁷Kacung Marijan, *Sistem Politik ...* h. 294

¹⁸Hanazaki, Yasuo, *Pers Terjebak*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), h. 20

¹⁹Luwarso, Lukas, *Wajah Media Massa Kita, Dalam Ery Sutrisno (Ed.), Reformasi Media Massa*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 1998), h. 27

Untuk memenuhi harapan ini, yang diperlukan bukan saja penggelaran aparat represif dari negara untuk mengendalikan oposisi dan pembangunan, tetapi tak kalah hebatnya upaya-upaya mengendalikan dan memanipulasi sistem reproduksi ideasional demi meratakan jalan bagi pengoperasian hegemoni makna.²⁰ Perekayasa isu menjadi efektif karena kontrol kekuasaan terhadap media massa, sehingga kekuasaan bisa menentukan apa yang boleh dimuat dan tidak boleh dimuat dalam hampir semua media massa resmi melalui budaya telepon, pembinaan, ancaman pemberedelan dan kontrol melalui saham yang ditanamkan di media massa yang bersangkutan.²¹

Budaya telepon merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat untuk mengontrol isi pers. Mereka menentukan isu mana yang boleh dimuat. Umumnya dilakukan pada saat surat kabar akan naik cetak dengan cara menelepon pemimpin redaksi surat kabar yang bersangkutan. Kemudian ada istilah pembinaan terhadap pers yang diambil perannya oleh Departemen Penerangan melalui Dewan Pers dengan Menpen sebagai ketuanya. Yang tidak kalah menakutkan adalah ancaman pemberedelan. Padahal secara nyata dalam UU Pers disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Pemberedelan terhadap suatu penerbitan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Karena pers pada zaman Orde Baru sudah menjadi institusi bisnis yang melibatkan modal yang tidak kecil. Jurnalisme abad ke-20 adalah produk kepentingan bisnis media dan pemasang iklan yang mengambil keuntungan besar.²²

Intervensi melalui penguasaan saham juga merupakan salah satu cara yang efektif bagi pemerintah. Seperti diketahui, banyak sekali kroni-kroni elite politik menguasai jaringan penerbitan di Indonesia yang cenderung membentuk konglomerasi media dari hulu ke hilir. Sebagai contoh mantan Menpen Harmoko menguasai mayoritas saham di Pos Kota Group yang membawahi 31 penerbitan, Surya Paloh dan Siti Hardijanti Rukmana

²⁰Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (prolog)*, (Bandung: MIZAN, 1996), h. 27-28

²¹Sudjatmiko, Budiman, Represi Melalui Media Massa Pada Masa Soeharto, Dalam Dedy N. Hidayat (Eds), *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 251

²²Chesney, Robert, *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 1998), h. 21.

dengan Surya Persindo Groupnya membawahi 6 penerbitan, Jawa Pos Group yang dimiliki oleh Eric Samola membawahi hampir 23 anak perusahaan penerbitan.²³

Data tersebut belum termasuk stasiun televisi swasta yang hampir semuanya dimiliki oleh kroni Cendana. Seringkali para pemilik saham tersebut ikut campur dalam masalah isi redaksional penerbitan. Contoh kasus majalah Gatra yang dimiliki oleh Bob Hasan. Si bos terlalu sering mengintervensi pemberitaan terutama jika menyangkut kepentingan Cendana dan kepentingan bisnisnya. Namun di tengah gencarnya intervensi dan kuatnya belenggu yang diterapkan pemerintah ketika itu, tak juga mampu membuat seluruh kekuatan media di Indonesia melemah. Media tidak mau dikebiri dan hanya diam mengikuti permainan politik orde baru. Banyak media yang memberontak melalui tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah, baik itu terhadap kebijakan maupun keputusan yang diambil. Bahkan banyak pula yang membeberkan keburukan pemerintah ketika itu.

Akibatnya, pada tahun 1994²⁴ banyak media yang diberedel, seperti TEMPO, deTIK, dan Monitor, *Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, *Pelita* dan lain-lain. Namun majalah TEMPO menjadi satu-satunya media massa yang berjuang dan terus melawan pemerintah orde baru. Majalah TEMPO diberedel dua kali selama rezim orde baru, yakni tahun 1982 dan 1994. Pembredelan pertama terjadi pada 12 April 1982, TEMPO diberedel oleh Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo, karena dianggap telah melanggar kode etik pers lantaran berani melaporkan situasi Pemilu saat itu yang ricuh. Ide pemberedelan itu sendiri datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diketuai Harmoko, wartawan harian Pos Kota.²⁵

Saat itu TEMPO meliput kampanye partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Presiden Soeharto, yang notabene motor Partai Golkar, tidak suka dengan berita tersebut. Pada 7 Juni 1982, pemberedelan atas Majalah TEMPO dicabut setelah Goenawan membubuhkan tanda tangan di secarik kertas. Secarik kertas itu berisi permintaan maaf

²³Hanazaki, Yasuo, *Pers Terjebak*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), h. 104-107

²⁴Bella Septiarani, *Aksi Perlawanan Media Massa Terhadap Rezim Otoriter di Indonesia, Studi Kasus: Majalah Tempo*, (Jakarta: Universitas Bakrie), h. 2

²⁵Tim Alumni. *Kasus Pencabutan SIUPP Tempo*, (Bandung: Alumni, 1998)

TEMPO dan kesediaan untuk dibina oleh pemerintah, hanya karena tak ada pilihan bagi Goenawan Muhammad.²⁶ Namun pada 21 Juni 1994, TEMPO kembali diberedel ber-sama beberapa majalah lain yaitu Editor dan deTik. Kali ini penyebabnya adalah berita TEMPO terkait pembelian kapal perang eks Jerman Timur oleh BJ Habibie.

Berita tersebut tidak menyenangkan para pejabat militer karena merasa otoritasnya dilangkahi. Namun, berita BJ Habibie hanyalah alasan pembenaran, karena penyebab dasarnya adalah karena Presiden Soeharto tidak suka TEMPO dari dulu.²⁷ Lagi-lagi pemerintah memberikan *deal-deal* di belakang layar yang membolehkan TEMPO terbit kembali dengan syarat Gunawan Mohammad keluar dari TEMPO.²⁸ Kemudian TEMPO terbit kembali pada tanggal 6 Oktober 1998, setelah jatuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Ciri yang menonjol dalam pelaksanaan kebebasan di Indonesia, kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada pers oleh pemerintah tidak dibuktikan melalui pengadilan.²⁹ Setiap kesalahan yang ditimpakan kepada pers tidak pernah dibuktikan secara hukum. Penafsiran secara sepihak oleh pemerintah sering dilakukan. Salah satu yang menonjol dalam periode ini adalah seringkali ukuran-ukuran yang dipakai untuk melaksanakan kebebasan pers berbeda.

Ukuran tentang apa yang boleh dimuat dan tidak boleh dimuat tidak pernah konsisten setiap waktu. Contoh yang menimpa majalah mingguan *Fokus* tahun 1984.³⁰ *Fokus* dibredel dikarenakan memuat artikel yang berisi daftar 200 orang kaya di Indonesia, tetapi untuk kasus berita yang sama lima tahun kemudian tidak menjadi persoalan. Walaupun demikian, tidak berarti pers berdiam diri dan tidak melakukan kontrol terhadap pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menyiasati keadaan tersebut. Seorang wartawan senior, Jakob Oetama pernah mengemukakan, agar tetap selamat,

²⁶Laporan Tahunan PT Tempo Inti Media Tbk. 2010

²⁷*Ibid.*

²⁸Moch. Syahri, *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, (Malang: Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2002)

²⁹Armada, Wina, *Menggugat Kebebasan Pers*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), h. 53

³⁰Harry Aveling, *Rahasia Membutuhkan Kata*, terj. Secrets Need Words (Magelang: Indonesia Tera, 2003), h. 112

pers Indonesia harus berlaku seperti kepingan bebelok jika terhalang batu.³¹ Salah satu yang digunakan adalah penggunaan bahasa eufimisme dalam melaporkan suatu peristiwa yang sensitif.

Eufimisme merupakan gaya bahasa yang menuntut pembaca untuk bisa melihat hal yang tersirat. Akibatnya muncullah dalam khasanah surat kabar kata-kata diamanakan untuk mengganti kata ditangkap, diminta keterangan untuk menggantikan kata hukuman, penyesuaian harga untuk menggantikan istilah kenaikan harga, perbedaan pendapat untuk menggambarkan adanya perpecahan.

3. Pers Indonesia Pasca Reformasi

Langkah dadakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan menghapus keberadaan Departemen Penerangan dalam jajaran Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpinnya, pada Oktober 1999, seolah-olah menjadi klimaks mengejutkan dalam proses keterbukaan dan demokratisasi kehidupan pers di Indonesia. Sudah diakui secara meluas bahwa pers Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan reformasi itu, yang mencapai momen bersejarah dengan berhentinya Soeharto sesudah berkuasa selama 32 tahun, pada 21 Mei 1998. Meskipun pers bukanlah pelopor gerakan reformasi itu, sulit dibayangkan, gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa itu akan bergulir tanpa pemberitaan dan dukungan gencar pers Indonesia, baik dari media cetak maupun elektronik.

Namun dua bulan setelah Suharto jatuh, kondisi Indonesia kian memburuk, bukannya membaik. Meskipun ada sejumlah kemajuan dalam kebebasan berekspresi, kemungkinan reformasi politik dan ekonomi yang menyeluruh telah memudar.³² Kekuatan dominasi kuasa rezim yang meminggirkan dan menghilangkan otonomi media massa pada masa pemerintah Suharto tidak berlaku dengan keputusan Presiden BJ Habibie untuk mencabut Permenpen Nomor 01 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pada 5 Juni 1998. Setahun kemudian pemerintah bersama legislatif mereformasi Undang-undang Pers yang lama dan menggantinya dengan Undang-undang baru, yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³¹Luwarso, Lukas. *Wajah Media ...*, h. 28

³²Forester, Geoffrey, *Jatuhnya Soeharto*, terj. The Fall of Soeharto, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1999), h. 18.

Beberapa pasal tentang kemerdekaan pers untuk memperoleh informasi diatur di dalamnya, begitu pula kran kebebasan terbuka bagi wartawan untuk memilih organisasi pers. Hal ini menghasilkan perubahan cukup signifikan pada kehidupan media massa, penerbitan pers marak. Singkatnya, media menjalankan peran politik, media dapat menjadi alat melawan bahkan menggulingkan pemerintahan represif bahkan diktator. Media memiliki keleluasaan gerak politiknya, tidak hanya menyuarakan dan tunduk pada mekanisme pasar sesuai dengan model neoliberal ekonomi. Media dapat berperan mendukung konsolidasi demokrasi dan hal ini merupakan otonomi politik media. Media tanah air kini lebih leluasa. Tapi ancaman masih mengintai setiap saat. Pers Indonesia masih menghadapi ancaman *pseudo teror* dari kelompok masyarakat tertentu yang mengan-dalkan *mobocrazy* untuk menekan pers.³³

Berbagai kasus pendudukan dan penyerangan kantor media oleh sejumlah kelompok masih terjadi di era reformasi. Kritikan dan kontrol sosial yang dilakukan media memang tak mudah diterima oleh pihak yang menjadi sorotan. Seringkali mereka mengerahkan massa dan pendukungnya untuk menekan media yang melakukan fungsi *watch dog*. Tak hanya menekan dalam bentuk *pressure statement*, tapi sejumlah wartawan bahkan dibunuh untuk membungkam mereka menyuarakan ketidakadilan. Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sejak 1996, masih ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum diketahui siapa pelakunya.

Fuad Muhammad Syafruddin	Harian Bernas Yogyakarta	Meninggal karena penganiayaan, 16 Agustus 1996, di Yogyakarta
Naimullah	Sinar Pagi	Ditemukan terbunuh pada 25 Juli 1997 di Pantai Penibungan, Kalimantan Barat.
Ersa Siregar	RCTI	Tewas ditembak dalam baku tembak antara pasukan militer Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 29 Desember 2003 di Aceh.

³³Christianto Wibisono, *Pers dalam Era reformasi*, dalam Reformasi Media Massa, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998) h 95.

Herliyanto	<i>freelance</i>	Ditemukan tewas pada 29 April 2006 di Probolinggo, Jawa Timur.
Ardiansyah Matra'is	Merauke TV	Ditemukan tewas pada 30 Juli 2010 di Merauke
Ridwan Salamun	Sun TV	Tewas pada 21 Agustus 2010 di Tual, Kepulauan Maluku, saat meliput bentrokan antarwarga desa setempat
Alfrets Mirulewan	Pelangi (Pemred)	Tewas pada 17 Desember 2010 di Kisar, Maluku
Muhammad Jamaludin	TVRI	Diculik orang bersenjata di Kantornya di Banda Aceh dan ditemukan tewas pada 17 Juni 2003.

Selain itu masih banyak kasus lain yang dialami wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hingga kini. Penyerbuan kantor media massa di ibukota dan daerah bahkan terjadi hingga tahun 2014 ini.

D. Penutup

Aksi kekerasan terhadap media di Indonesia, ditambah dengan kasus pemberedelan yang berulang, menunjukkan adanya kekuatan pengawasan yang kuat yang telah dilakukan media di tanah air. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan, mengandung konsekuensi ketika hal itu berhadapan dengan kekuasaan dan kelompok dominan. Sejarah kelam media di Indonesia, terjadi pada zaman pemerintahan orde baru. Meski masih berlanjut pada masa reformasi, namun perkembangan signifikan pada era kebebasan pers di mulai ketika itu. Pengaruh media terhadap pemerintahan begitu kuat. Media bahkan bisa mengubah keputusan pemerintah yang telah disepakati. Salah satu contoh adalah ketika gencarnya aksi demo dan diikuti oleh pemberitaan terhadap penolakan harga bahan bakar minyak (bbm) oleh pemerintah di seluruh Indonesia, Presiden Sussilo Bambang Yudhoyono pernah sampai tiga kali menurunkan harga BBM setelah diputuskan dinaikkan antara tahun 2008 – 2009.

Dalam pentas politik, media baru saja mempertontonkan pengaruh besarnya untuk menggiring opini publik terhadap pencitraan tokoh calon

pemimpin bangsa yang maju dalam Pemilu 2014. Media mampu membangun sekaligus menjatuhkan image para tokoh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Armada, Wina, *Menggugat Kebebasan Pers*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Ati Rahmiati, *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunitas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Bella Septiarani, *Aksi Perlawanan Media Massa Terhadap Rezim Otoriter di Indonesia Studi Kasus: Majalah Tempo*, Jakarta: Universitas Bakrie.
- Chesney, Robert, *Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 1998.
- Christianto Wibisono, *Pers dalam Era reformasi*, dalam Reformasi Media Massa, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998.
- Depari, Eduard, dkk, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Suatu Kumpulan Karangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.
- Forester, Geoffrey, *Jatuhnya Soeharto*, terj. The Fall of Soeharto, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1999.
- Hanazaki, Yasuo, *Pers Terjebak*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998.
- Harry Aveling, *Rahasia Membutuhkan Kata*, terj. Secrets Need Words, Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Jamhur Poti, *Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, Tanjungpinang: FISIP Umrah.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010
- Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (prolog)*, Bandung: MIZAN, 1996.
- Luwarso, Lukas, *Wajah Media Massa Kita. Dalam Ery Sutrisno (Ed). Reformasi Media Massa*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 1998.
- Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 1991.

- Moch. Syahri, *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, Malang: Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2002.
- Moch. Syahri, *Intervensi Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers dan Munculnya Eufimisme*, Malang: Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2002.
- Rizal Mallaranggeng, *Pers Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Schram, Wilbur dan Peterson. *Empat Teori Pers*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Siebert, Peterson, dan Schramm, *Empat Teori Pers*, Jakarta: Intermega, 1986.
- Sobur. A, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Stephen W. Littlejohn. 1999 *Theories of Human Communication*, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Sudjatmiko, Budiman, Represi Melalui Media Massa Pada Masa Soeharto, Dalam Dedy N. Hidayat.(Eds), *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Tim Alumni, *Kasus Pencabutan SIUPP Tempo*, Bandung: Alumni, 1998.